

STRATEGI KOLABORASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DENGAN PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN SDGS

Oleh:

¹Muhammad Mochtar Mandala Silam, ²Rosdaniah, ³Cahyo Budi Santoso,
⁴Ramli Semmawi, ⁵Syahril

¹STIA Bina Banua Banjarmasin

Jl. Pramuka No.17, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249

²IAIN Takengon

Jl. Yos Sudarso No.10, Takengon Bar., Kec. Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24519

³Universitas Harapan Bangsa

Jl. Raden Patah No.100, Kedunglongsir, Ledug, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

⁴IAIN Manado

Jl. Ring Road, Malendeng, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129

⁵Universitas Islam Depok

Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16511

e-mail: mochtar.mandala69@gmail.com¹, rosdaniah_wil@yahoo.co.id², cahyobudi@uhb.ac.id³,
ramlisemmawi@iain-manado.ac.id⁴, syahril@uidepok.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the collaborative strategy between zakat institutions and the government in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The approach used was qualitative with descriptive research. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, involving zakat institution managers, government officials, and beneficiaries (mustahik). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that collaboration between zakat institutions and the government has contributed to poverty alleviation, increased access to education, and health services. However, this collaboration has not been optimal due to obstacles such as lack of coordination, lack of data integration, and differences in program approaches. Therefore, more effective strategic collaboration is needed through integration programs, strengthening integrated data systems, utilizing digital technology, and increasing human resource capacity. This study concludes that synergistic collaboration between zakat institutions and the government has significant potential for achieving the SDGs sustainably in Indonesia.

Keywords: Collaboration, Zakat, Government, SDGs, Sustainable Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan pengelola lembaga amil zakat, pihak pemerintah, serta penerima manfaat (mustahik). Analisis data

dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga amal zakat dan pemerintah telah memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, kolaborasi tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi, belum terintegrasinya data, serta perbedaan pendekatan program. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih efektif melalui integrasi program, penguatan sistem data terpadu, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang sinergis antara lembaga amal zakat dan pemerintah berpotensi besar dalam mempercepat pencapaian SDGs secara berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kolaborasi, Zakat, Pemerintah, SDGs, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs mencakup berbagai dimensi penting seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, tantangan dalam mencapai target SDGs menjadi sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor non-pemerintah, termasuk lembaga keuangan sosial keagamaan seperti lembaga amal zakat (Sholihah, 2024).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal, zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk mendukung program pembangunan pemerintah (Fitriyani et al., 2025).

Namun demikian, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat penghimpunan dibandingkan dengan potensi yang ada, distribusi yang belum merata, serta kurangnya integrasi program zakat dengan program pembangunan nasional. Selain itu, masih terdapat kesenjangan koordinasi antara lembaga amal zakat dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan program-program zakat sering berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi kolaborasi yang efektif agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pencapaian SDGs (Fauziah et al., 2025).

Kolaborasi antara lembaga amal zakat dan pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan sinergi program yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam regulasi, kebijakan, serta perencanaan pembangunan nasional, sementara lembaga amal zakat memiliki keunggulan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui integrasi program, penyelarasan indikator kinerja dengan target SDGs, serta penguatan tata kelola

zakat yang transparan dan akuntabel. Bahkan, berbagai inisiatif telah dilakukan seperti kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan lembaga internasional maupun pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan berbasis zakat (Amalia & Huda, 2020).

Lebih lanjut, strategi kolaborasi ini juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan model pemberdayaan berbasis komunitas. Integrasi layanan keuangan syariah, seperti penggunaan platform perbankan digital untuk pembayaran zakat, juga menjadi salah satu bentuk inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola zakat dalam memahami indikator SDGs menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa program zakat yang dijalankan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan (Effendi & Nariah, 2023).

Dalam praktiknya, pemerintah melalui BAZNAS juga telah menyusun berbagai strategi dalam rangka menyelaraskan program zakat dengan SDGs, termasuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian distribusi zakat agar tepat sasaran. Proyeksi pengumpulan zakat yang terus meningkat menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan sosial di Indonesia. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga amil zakat, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Firdaus et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai strategi kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah dalam pencapaian SDGs. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi model kolaborasi yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang sinergis, diharapkan zakat tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Zakat dan Lembaga Amil Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang disebut lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan akuntabel. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah melalui badan resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga amil zakat (LAZ) yang mendapatkan izin operasional. Fungsi utama lembaga ini tidak hanya sebatas penyaluran bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Konsep Kolaborasi dalam Sektor Publik

Kolaborasi merupakan suatu proses kerja sama antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks

sektor publik, kolaborasi menjadi pendekatan penting dalam mengatasi permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga amil zakat, dikenal sebagai *collaborative governance*. Konsep ini menekankan pada keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta evaluasi program pembangunan (Gustanto et al., 2025).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Beberapa tujuan SDGs yang relevan dengan pengelolaan zakat antara lain:

1. Penghapusan kemiskinan (No Poverty)
2. Tanpa kelaparan (Zero Hunger)
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (Good Health and Well-being)
4. Pendidikan berkualitas (Quality Education)
5. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth)

Zakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi program zakat dengan SDGs menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan (Jihadi, 2026).

Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial. Zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi melalui program pemberdayaan.

Kontribusi Zakat terhadap Pembangunan:

1. Mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial
2. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan
3. Mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan produktivitas mustahik sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki (pembayar zakat). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak jangka panjang dalam pembangunan ekonomi

Strategi Kolaborasi Lembaga Amil Zakat dan Pemerintah

Kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung pembangunan nasional. Strategi kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Strategi Kolaborasi:

1. Integrasi program zakat dengan program pemerintah
2. Sinkronisasi data mustahik dengan data kemiskinan nasional
3. Penguatan regulasi dan kebijakan zakat
4. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

Melalui kolaborasi yang baik, program zakat dapat diselaraskan dengan target SDGs sehingga dampaknya dapat lebih terukur dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola lembaga amil zakat, perwakilan pemerintah, serta penerima manfaat (mustahik). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan lembaga zakat, regulasi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai efektivitas strategi kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Secara umum, bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi sinergi dalam program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Lembaga amil zakat telah menjalankan berbagai program produktif seperti bantuan usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki program-program yang sejalan, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menemukan bahwa kedua pihak seringkali menjalankan program secara terpisah, sehingga terjadi tumpang tindih atau bahkan kesenjangan dalam distribusi bantuan (Nafis, 2026).

Dari aspek pengentasan kemiskinan, zakat terbukti memiliki kontribusi nyata dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup. Program zakat produktif, seperti bantuan modal usaha dan pendampingan, mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dalam beberapa kasus, penerima zakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial berhasil meningkatkan pendapatan dan bahkan bertransformasi menjadi muzakki (Diana & Normasyhuri, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam penghapusan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan kesinambungan program yang dijalankan (Fikraa & Nasution, 2025).

Dalam bidang pendidikan, kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah juga memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, serta pembangunan sarana pendidikan menjadi bentuk kontribusi nyata dari pengelolaan zakat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara lembaga zakat dan pemerintah dalam sektor pendidikan masih terbatas. Kurangnya integrasi data penerima manfaat menyebabkan adanya kemungkinan penerima bantuan ganda atau sebaliknya, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terjangkau (Hermantoro & Zuraidah, 2023).

Pada sektor kesehatan, peran zakat juga cukup signifikan dalam membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Program seperti bantuan biaya pengobatan, layanan kesehatan gratis, serta penyediaan fasilitas kesehatan berbasis zakat menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung SDGs. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan belum adanya sistem kolaborasi yang terintegrasi dengan program kesehatan pemerintah. Hal ini menyebabkan dampak yang dihasilkan belum maksimal dan masih bersifat parsial (Darmawan et al., 2025).

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil zakat memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kedekatan dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan lembaga zakat untuk lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan birokrasi pemerintah yang cenderung lebih kompleks. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki kekuatan dalam hal regulasi, kebijakan, serta jangkauan program yang lebih luas. Oleh karena itu, kolaborasi antara kedua pihak seharusnya dapat saling melengkapi dan memperkuat peran masing-masing dalam pembangunan (Elzaphira et al., 2025).

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kolaborasi ini. Pertama, masih rendahnya tingkat koordinasi dan komunikasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah. Kedua, belum adanya sistem integrasi data yang memadai, sehingga menyulitkan dalam perencanaan dan evaluasi program. Ketiga, perbedaan pendekatan dan prioritas antara kedua pihak yang terkadang menjadi hambatan dalam menyusun program bersama. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep integrasi zakat dengan SDGs (Karunia et al., 2025).

Dalam perspektif teori kolaborasi, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip collaborative governance belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Kolaborasi yang efektif seharusnya didasarkan pada kepercayaan, transparansi, komunikasi yang baik, serta adanya tujuan bersama yang jelas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ego sektoral yang menghambat sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan (Putri & Gunaepi, 2025).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih terarah dan sistematis. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah integrasi program zakat dengan program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran (Wahyudi et al., 2025). Selain itu, pengembangan sistem data terpadu antara lembaga zakat dan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam mengintegrasikan data serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat (Aisyah, 2025).

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kolaborasi. Pelatihan dan edukasi mengenai konsep SDGs serta pengelolaan zakat berbasis pembangunan berkelanjutan perlu diberikan kepada pengelola zakat maupun aparatur pemerintah. Dengan demikian, kedua pihak memiliki

pemahaman yang sama dalam merancang dan melaksanakan program yang terintegrasi (Ulhak, 2025).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari masing-masing pihak. Tanpa adanya komitmen yang kuat, kolaborasi yang dilakukan hanya akan bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung pencapaian SDGs (Ahsani et al., 2026).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat sinergi, meningkatkan koordinasi, serta mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan strategi kolaborasi yang tepat, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara lembaga amil zakat dan pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Lembaga amil zakat terbukti mampu memberikan kontribusi nyata melalui program-program pemberdayaan dan bantuan sosial, sementara pemerintah memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan, regulasi, dan penyediaan infrastruktur pembangunan. Sinergi antara kedua pihak ini menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas kolaborasi yang telah berjalan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi, belum terintegrasinya data penerima manfaat, serta perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih terstruktur, seperti integrasi program, penguatan sistem data terpadu, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antara lembaga amil zakat dan pemerintah, potensi zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, R. K., Suhada, W. D., Meisoora, K., & Dentri, R. (2026). Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Sebagai Instrumen Transformasi Sosial Dan Pembangunan Sosio-Ekonomi Dalam Mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs). *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3023–3030.
- Aisyah, S. (2025). Optimalisasi Zakat , Wakaf Dan Infaq Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(11), 6109–6127.
- Amalia, R. Y., & Huda, N. (2020). Strategi Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan

Akses Sanitasi Dan Air Bersih (Studi Kasus Laz Harfa Serang). *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 2015–2018.

- Darmawan, A., Ikhwan, M. N., Khoridatul, I., & Taufiq, A. (2025). Analisis Bibliometrik Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Taraadin*, 1(2), 1–12.
- Diana, T. M., & Normasyhuri, K. (2025). Analisis Peran Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Upaya Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs). *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(3), 311–327.
- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 6(2), 218–229.
- Elzaphira, D. N., Nabilah, K. P., & Shahira, N. (2025). Model Keuangan Islam Sebagai Strategi Implementasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Provinsi Riau : Studi Kasus Islamic Social Financing. *Prosiding Seminar Nasional Imsya Indonesia*, 1(1), 66–77.
- Fauziah, A., Ramadani, N. S., Hidayati, N. T., Desiana, R., Yudanta, Z. F., & Hidayati, A. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami. *Peng Jurnal Ekonomi*, 2(1), 2080–2088.
- Fikraa, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2025). Optimalisasi Pendistribusian Zakat Melalui Transformasi Proses Bisnis Perbankan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Utara Ayu. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(6), 82–87.
- Firdaus, N. A., Restu, Laeliah, R., & Ridwan, M. (2025). Implementasi Pelaksanaan Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi Di Indonesia. *Tafakur Times Jurnal Study Islam*, 1(3), 304–321.
- Fitriyani, N., Sarah, S., Azkiyya, G., & Qotrunnada, H. (2025). Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) : Perspektif Maqashid Syariah Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 564–569.
- Gustanto, E. S., Hidyanto, B. I., & Faozi, M. (2025). Pendistribusian Zakat Yang Tepat Untuk Mencapai Target Sdg's Dan Target Global 2030: Studi Kasus Baznas Diy. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 149–166. <https://doi.org/10.36701/Al-Khiyar.V5i2.2042>
- Hermantoro, B., & Zuraidah. (2023). Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / Sdgs) Di Kota Kediri. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(07), 42–49.
- Jihadi, A. A. (2026). Analisis Dampak Zakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs 4). *Jse: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 1–8.
- Karunia, R., Kamilah, M., Alfiansyah, A., & Fadilah, M. B. (2025). Kontribusi Zakat

Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 24(10), 1–8.

- Nafis, A. W. (2026). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Negara Berkembang. *Journal Of Islamic Economic*, 1(1), 1–12.
- Putri, S. M., & Gunaepi, A. (2025). Efektivitas Peran Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat Serta Strateginya Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Kontribusinya Dengan Sdg's (Studi Kasus Poroz Pusat). *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(4), 218–228.
- Sholihah, D. (2024). Mengembangkan Islamic Sosial Finance (Isf) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi Sdgs (Sustainable Development Goals). *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 395–408.
- Ulhak, M. Z. (2025). Peran Zakat Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif. *Baitul Maal*, 2(2), 169–179.
- Wahyudi, M., Rokhanyah, S., Afif, N., & Qurrota, S. S. (2025). Sinergi Zakat Dan Sdgs : Pelatihan Penyelarasan Program Lembaga Zakat Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 283–290.